



Pemerintahan
Kota Batam
2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugera-NYA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019, yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi suatu kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk memberikan pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksana organisasi.

Tujuan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2019 yaitu guna mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan urusan penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satupintu (PTSP) berjalan efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA. 2019 dapat menjadi dokumen yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depan.

Batam, Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BATAM



FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP.19680412198909 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM DPMPSTP KOTA BATAM	3
1.3. PERAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
1.4. ANALISA SWOT	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS	13
2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA DPMPSTP KOTA BATAM	19
3.2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI	22
3.3. ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN	25
3.4. REALISASI ANGGARAN	27
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal itu maka sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka pada setiap akhir tahun pelaksanaan APBD disusun dokumen pengukuran kinerja Pemerintah daerah dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk penyampaian LAKIP daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Kota Batam adalah sebagai tolok ukur tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan PTSP.

Selanjutnya Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kota Batam atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019. Laporan kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasar Peraturan Presiden No. 8 tahun 2014 Pasal 4 “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD”, Pasal 5 “Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja”. Dalam hal Entitas Akuntabilitas SKPD menyusun rencana kerja anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar penyusunan Penetapan Kinerja (Penja) yang adalah dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Permenpan RB No. 53 tahun 2014 bahwa format penyampaian laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. (format Lampiran II.1)

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Batam, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah bidang penanaman modal dan sub bidang PTSP di Kota Batam;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPMPTSP Pemerintah Kota Batam;
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab DPMPTSP Kota Batam dalam pembangunan daerah;
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan;

5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
6. Mendorong Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP Kota Batam untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

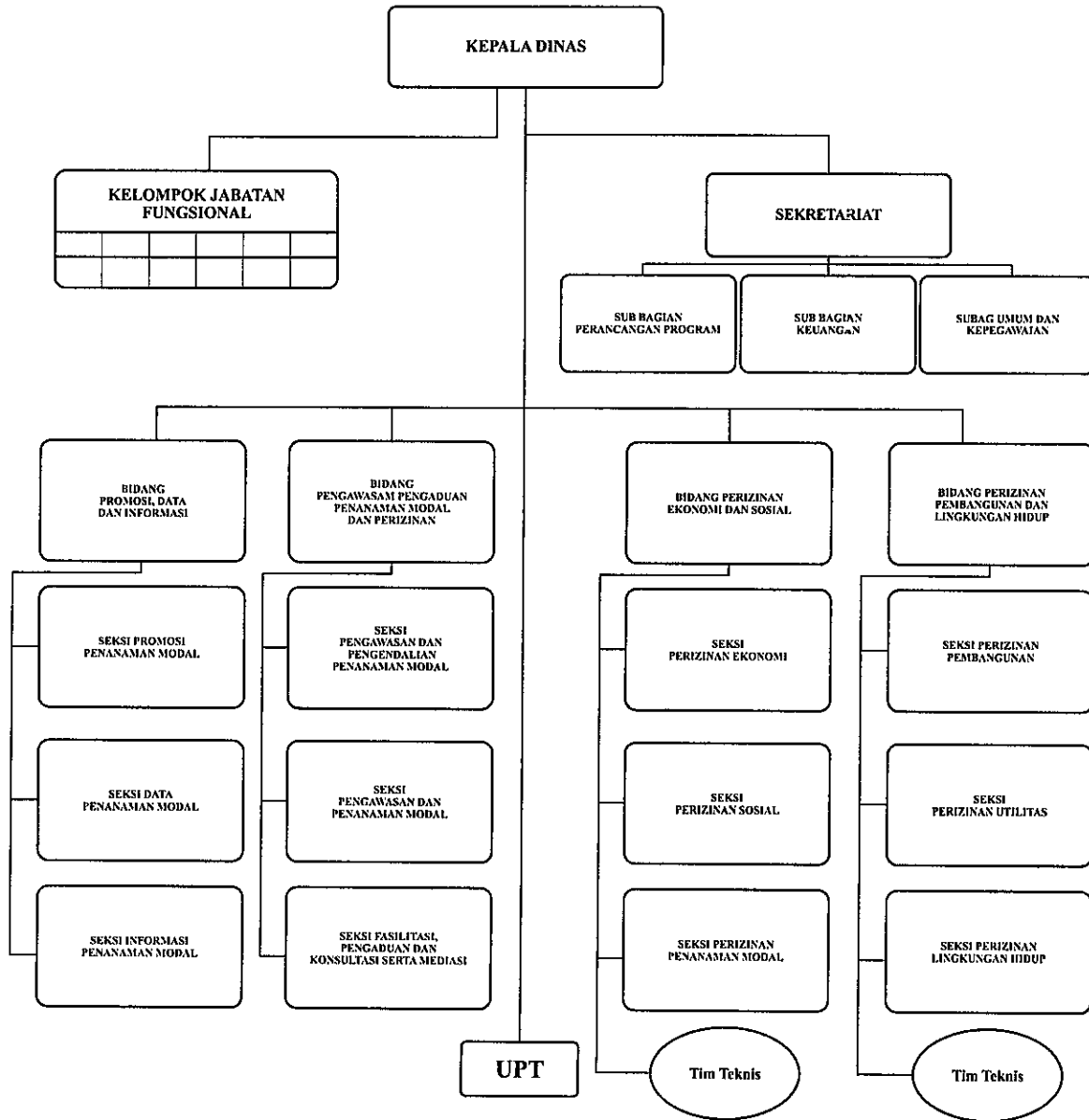
1.2 Gambaran Umum DPMPTSP Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal. DPMPTSP Kota Batam mempunyai tugas pokok membantu Walikota Batam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas maka ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan gambar sebagai berikut :

Gambar. 1.1
 Struktur Organisasi
 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 56/2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, membawahi Sekretaris dan 4 Bidang dengan uraian struktur sebagai berikut :

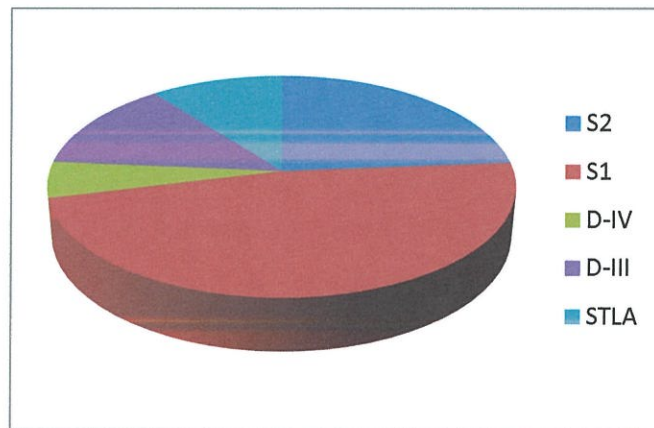
- a. Sekretaris; dengan 3 sub bagian yaitu :
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Promosi, Data dan Informasi; dengan 3 seksi yaitu :
 - Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Data Penanaman Modal; dan
 - Seksi Informasi Penanaman Modal.
- c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan; dengan 3 seksi yaitu :
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
 - Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi.
- d. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial; dengan 3 seksi yaitu :
 - Seksi Perizinan Ekonomi;
 - Seksi Perizinan Sosial; dan
 - Seksi Perizinan Penanaman Modal.
- e. Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dengan 3 seksi yaitu :
 - Seksi Perizinan Pembangunan;
 - Seksi Perizinan Utilitas; dan
 - Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana struktur organisasi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 38 pegawai dari berbagai keahlian. Struktur organisasinya terdiri dari pejabat eselon II b 1 (satu) orang, eselon III a 1 (satu) orang, eselon III b 4 (empat) orang, eselon IV a 15 (limabelas) orang dan 17 (tujuhbelas) orang staf. Komposisi yang belum berimbang

pada tingkat kuantitas pegawai terhadap capaian kinerja tahun 2019 (data pegawai terlampir).

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan formal adalah Pasca Sarjana/S2 9 (sembilan) orang, Sarjana/S1 18 (delapanbelas) orang, diploma 5 (lima) orang, SLTA 4 (empat) orang, sesuai gambar berikut :

Gambar 1.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



Selanjutnya menyangkut barang milik daerah/inventaris dalam pengelolaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sampai akhir tahun 2019 meliputi :

1. Bangunan dan Gedung :

Bangunan dan Gedung yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam saat ini masih berstatus sewa, terdiri dari Ruang Pelayanan, Ruang Kadis, Ruang Rapat, Sekretaris dan 4 (empat) Ruang Bidang, Ruang, Arsip dalam kondisi baik.

2. Peralatan dan Mesin :

a. Kendaraan

b. Mesin yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

~ Komputer	: 83 Unit
~ Laptop	: 4 Unit
~ Printer	: 33 Unit
~ Scanner	: 9 Unit

- ~ Infocus : 2 Unit
 - ~ UPS : .. Unit
 - ~ Pesawat Telepon : .. Unit
 - ~ Facsimile : .. Unit
 - ~ Alat Penghancur Kertas : 2 Unit
 - ~ Mesin Antrian : 2 Unit
- c. Perlengkapan kantor yang masih tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam meliputi :
- ~ AC : 10 Unit
 - ~ Camera : .. Unit
 - ~ Monitor Display : 2 Unit
 - ~ Televisi : .. Unit
 - ~ Scan Finger : 2 Unit
 - ~ Running Text : 1 Unit

1.3 Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai perangkat daerah yang mempunyai peran penting didalam memacu pertumbuhan ekonomi regional Kota Batam salah satu faktor untuk mencapai pertumbuhan pertumbuhan ekonomi adalah melalui "pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha" yang kondusif sebagaimana tercantum dalam salah satu dari sebelas prioritas nasional dan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2016-2021.

Ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi perhatian pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha. **Pertama**, sektor penanaman modal tidak saja semakin di butuhkan perannya untuk mengerakan laju perekonomian tetapi juga diarahkan untuk menjawab tentang persoalan-persoalan mendasar seperti pengembangan sektor strategis dan komonditas unggulan serta pemerataan penanaman modal. **Kedua** , tentang ketidakpastian perekonomian global dalam 5 (lima) tahun kedepan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam bidang penanaman modal.

Untuk mencapai target penanaman modal yang di harapkan maka dibutuhkan prioritas kegiatan yang terfokus pada peningkatan kualitas promosi dan kerja sama, pelayanan penanaman modal yang prima dan peningkatan kualitas pengendalian penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau sebagaimana yang diamanahkan oleh

Perpres RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah yang mengatur kelembagaan dan kewenangan serta standar penyelenggaraan pelayanan terpadu daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha.

Dengan demikian dalam mengembangkan iklim penanaman modal dan iklim berusaha yang berdaya saing, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, DPMPTSP Kota Batam telah didukung dengan peraturan perundang-undangan yang kuat sehingga lebih memudahkan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategi dalam bidang penanaman modal dan menuangkannya ke dalam program/kegiatan pada Perubahan RPJMD Kota Batam periode 2017-2020 maupun rencana perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Batam tahun 2017-2020.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Batam di bidang penanaman modal dan sub bidang pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam juga mengemban tugas dalam pencapaian target penerimaan pendapatan di Tahun Anggaran 2019 melalui pelaksanaan penerimaan retribusi sebesar Rp. 76.700.000.000, dimana target penerimaan retribusi tersebut terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan target sebesar Rp. 30.000.000.000;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan target sebesar Rp. 1.700.000.000;
3. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan target sebesar Rp. 45.000.000.000.

Dari target yang ditetapkan realisasi capaian ketiga retribusi di atas memperoleh penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp. 35.832.583.488.54 atau sebesar 46.72% dari target. Jauhnya realisasi capaian dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya gejolak penurunan ekonomi dunia, sehingga realisasi proyek-proyek yang sudah direncanakan mengalami penundaan.

1.4 Analisa SWOT

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan.

1. Kekuatan (strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mencapai Tujuan dan Sasaran adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan daerah untuk bekerja normatif dan taat aturan;
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- d. Dukungan perangkat organisasi yang solid;
- e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- c. Alokasi dana promosi penanaman modal serta sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- d. Koordinasi dengan OPD lainnya belum berjalan secara optimal;
- e. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan akses dan kenyamanan.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang profesional dan handal;
- c. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan terpadu secara online menjadi tuntutan masyarakat serta pengawasan masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap penyelenggaraan perizinan yang bersih dan transparan merupakan faktor yang dapat meningkatkan standar pelayanan yang harus diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih adanya SKPD teknis yang mempertahankan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan, mengakibatkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu belum maksimal;
- b. Kebijakan anggaran yang masih membatasi promosi penanaman modal dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, sehingga pelaksanaan urusan penanaman modal belum maksimal.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan panduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 1
Aspek Strategis OPD

	<u>Kekuatan</u>	<u>Kelemahan</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP; 2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi; 3. Aparat yang komitmen; 4. Perangkat organisasi yang solid; 5. Pola kerja yang baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Perwako tentang PTSP yang baru masih belum disahkan; 2. Jumlah dan kapasitas SDM; 3. Alokasi dana promosi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal belum optimal; 4. Koordinasi dengan SKPD lain; 5. Pola pembinaan aparatur;
<u>Peluang</u>	<u>Strategi S-T</u>	<u>Strategi W-O</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 ttg Standar Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu secara online; 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi secara intens agar draft perwako segera ditindaklanjuti menjadi perwako; 2. membangun

<p>2011 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;</p> <p>5. Peraturan Walikota Batam No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;</p> <p>6. Tuntutan akuntabilitas;</p> <p>7. Kota Batam menjadi tujuan investasi dengan kondisi geografi yang strategis.</p>	<p>mewujudkan akuntabilitas;</p>	<p>mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;</p> <p>3. menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;</p> <p>4. membangun profesionalisme aparatur DPMPTSP Kota Batam mendorong peningkatan kinerja.</p>
<p><u>Ancaman</u></p> <p>1. Adanya jenis perizinan dan nonperizinan yang masih dilaksanakan oleh SKPD teknis;</p> <p>2. Belum terbentuk Tim Teknis pelaksanaan perizinan dan nonperizinan;</p> <p>3. Belum memiliki gedung permanen dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP</p>	<p><u>Strategi S-T</u></p> <p>1. menyatukan persepsi mengenai penyelenggaraan PTSP Daerah;</p> <p>2. membentuk tim teknis;</p> <p>3. mengusulkan pembangunan gedung permanen.</p>	<p><u>Strategi S-T</u></p> <p>1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparatur yang serasi dengan potensi yang ada.</p> <p>2. Melaksanakan SPIP dilingkungan OPD</p>

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan RPJMD Kota Batam periode 2016-2021, isu-isu strategis bidang penanaman modal adalah :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin berusaha dan realisasi investasi.
2. Kurang memadainya kapasitas SDM dan infastruktur penunjang investasi

Kurang kondusifnya iklim& minat investasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah di susun berdasarkan perubahan rencana setrategis tahun 2016-2021, maka dinas penanaman modal dan PTSP kota batam melaksanakan visi gubernur kota batam yaitu: **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan misi 1 (satu) dalam RPJMD 2016-2021 , yaitu : *Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi* dan misi 4 (empat); yaitu : *Mewujudkan sektor penguatan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, investasi, dan pertanian/perikanan dalam menopang ekonomi daerah.*

Misi ini mewujudkan peningkatan pembagunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya asing, terutama berbasis agrobisnis / agroindustri, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri , serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata , melalui pengembangan industri pariwisata , yang berdaya asing , dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Batam tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

adalah “Terwujudnya iklim investasi daerah yang berdaya saing” dengan 2 sasaran yakni :

1. Meningkatnya realisasi investasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Untuk melihat konsistensi antara misi dan tujuan yang di sertai dengan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut;

Table 2.1. Matriks Hubungan Antar Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Misi Pertama (I) : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi	Terwujudnya iklim investasi daerah yang berdaya saing	1. Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
Misi Keempat (IV) Mewujudkan sektor penguatan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, investasi, dan pertanian/perikanan dalam menopang ekonomi daerah		2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terbit sesuai waktu SOP
		3. Realisasi Investasi

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi investasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Selanjut untuk melihat konsistensi antara tujuan dan sasaran beserta indikatornya, dapat dilihat dalam table berikut;

Table 2.2. Matriks Hubungan Antara Tujuan & Sasaran

tujuan	indikator	sasaran	indikator
Terwujudnya iklim investasi daerah yang berdaya saing	jumlah minat investasi PMDN berdasarkan izin prinsip	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi
	jumlah nilai realisasi investas PMDN berdasakan LKPM	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	1. Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
			2. Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP.

Sesuai dengan perubahan RPJMD 2016-2020, prioritas daerah di bidang penanaman modal adalah meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan investasi daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut;

1. Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan , kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan;
2. Mengikutsertakan dan melaksanakan bimtek / pelatihan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
4. Menerapkan monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan tindakan lanjut pengaduan masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan kepastian SDM pelayanan;
6. Terlaksananya pelayanan administrasi pengandaan barang/jasa pemerintah yang prima , mudah, cepat, transparan, dan akuntabel;
7. Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
8. Pelayanan data dan informasi 24 jam dan pemutakhiran data secara berkala.

Sedangkan strategi yang akan di tempuh adalah;

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM,
2. Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan serta melakukan pengendalian perizinan secara optimal
4. Terciptanya saran dan prasarana pendukung pengaduna masyarakat

5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu
6. Menciptakan pelayanan pengandaan barang/jasa yang mengacu kepada SOP;
7. Megembangkan peluang penanaman modal ;
8. Meningkatkan kualitas promosi dan kerjasama penanaman modal;
9. Meningkatkan promosi penanaman modal secara terpadu;
10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
11. Mengembangkan data dan sisitem informasi online yang mudah diakses.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, maka ditetapkan 3 (tiga) program OPD yang terdiri dari 1 (satu) program prioritas dan 2 (dua) program pendukung, yaitu :

1. Program Peningkatan Invetasi dan Kerjasama Pembangunan yang didukung 3 (tiga) kegiatan :
 - ~ Kegiatan Promosi Penanaman Modal;
 - ~ Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas;
 - ~ Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial.
2. Program Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran, yang didukung 1 (satu) yakni :
 - ~ kegiatan Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, didukung 1 (satu) yakni :
 - ~ kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat lebih jelas dan rinci pada lampiran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang: Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan guna mendukung rencana Capaiannya.

➤ Sasaran 1, dari Tujuan :

Meningkatnya Realisasi Investasi;

Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2019 terkait sasaran 1 adalah :

1. Realisasi Investasi sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah);

➤ Sasaran 2, dari Tujuan 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2019 terkait sasaran 2 adalah :

1. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan sebanyak 1.800 Izin;
2. Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP sebesar 90%.

Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2019.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah merupakan kesepakatan antara pihak yang penerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi setiap proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel. 3
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Rp. 2.5 T	2.334.069.687
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan	1.800 Izin	5.923.197.590
		Persentase Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Waktu SOP	90%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Batam

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sampai tahun 2019.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah “Terwujudnya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing” dengan sasaran : 1) Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator kinerja sasaran yakni : Rp. 2 Triliun realisasi investasi. Sasaran 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan indikator kinerja sasaran yakni : a) Jumlah perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan dan; b) Persentase penyelesaian perizinan dan nonperizinan sesuai waktu SOP. Rincian target kinerja sasaran dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2016	Capaian/Realisasi s.d Tahun			Capaian Tahun 2016 s/d 2021
					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	Rp.815.971.30	Rp.663.356	Rp.3.181.499.50	Rp.2.5 T	Rp. 3 T
2		Meningkatnya kualitas perizinan dan nonperizinan	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan	14.238 Izin	12.608 Izin	9.095 Izin	2.975 Izin	2.100 Izin
3			Persentase Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Waktu SOP		n.a	90%	n.a	59.11

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran 1 yang merupakan tolok ukur tercapainya tujuan organisasi realisasi investasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp. 4.876.614.000.000 195.06% dari target perubahan penetapan kinerja sebesar Rp. 2.500.000.000.000 atau sebesar 195.06% capaian realisasi untuk indikator kinerja realisasi investasi.

Sedangkan indikator kinerja sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari 2 (dua) indikator yakni : a) Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dengan target 1.800 Izin di tahun 2019 tercapai sebesar 165.27% dari target dengan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 2.975 Izin. b) Persentase penyelesaian perizinan dan nonperizinan sesuai waktu SOP, yaitu 90% penyelesaian izin sesuai waktu SOP, untuk indikator ini capaian realisasi tercapai 59.11% atau sebesar 65.67% dari target indikator kinerja yang ditetapkan yakni 90% izin yang selesai sesuai waktu SOP sehingga masih terdapat 40.89% izin yang selesai belum sesuai dengan waktu SOP.

Capaian Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2
Pencapaian Kinerja IKU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi	Kenaikan Reelisasi Investasi	5%	53.28%	1065.6
		Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler	10%	100%	100
		Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan	5%	100%	2000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online	99%	95%	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.26-100	86.00	100

Pada tahun 2019 tahun ketiga periode Renstra Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran dengan target yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, terdapat 4 (empat) indikator yang dapat mencapai target yaitu : 1) Kenaikan realisasi investasi; 2) Persentase penanaman modal yang menyampaikan LKPM secara reguler; 3) Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan; dan 4) Indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan 1 (satu) indikator sasaran pada IKU masih belum mencapai target yakni : Persentase jenis perizinan dan nonperizinan yang sudah online dikarenakan masih terdapat 4 perizinan yang belum online.

Selanjutnya untuk perbandingan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Batam dari tahun 2016 s/d 2019 dan target yang akan dicapai di tahun berjalan yakni tahun 2020 sesuai Perubahan Renstra periode 2016-2021 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang masih belum tercapai yakni : *Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP*, seperti yang kita lihat pada tabel 3.3.

Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi			
				2016 (n-3)	2017 (n-2)	2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi	Rp.2.5 T	Rp.815.971.30	Rp.663.356	Rp.3.181.498.50	Rp.4.876.614.00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	2.100 Izin	14.238 Izin	12.608 Izin	9.095 Izin	2.975 Izin
		Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	95%	n.a	n.a	n.a	59.11

Kemudian dari realisasi capaian indikator diatas, apabila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam di tahun 2020 perlu melakukan evaluasi dan perbaikan lebih signifikan pada indikator 2 yaitu *Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP* dari sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, yang capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel. 3.4 sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Pembandingan Capaian Kinerja
Perubahan Renstra 2019-2021

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021	Realsasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	9
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Rp. 3 T	Rp.2.5 T	Rp. 3 T
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan	2.100 Izin	2.975 Izin	2.100 Izin
3		Persentase Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Waktu SOP	99%	59.11	59.70%

3.2 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

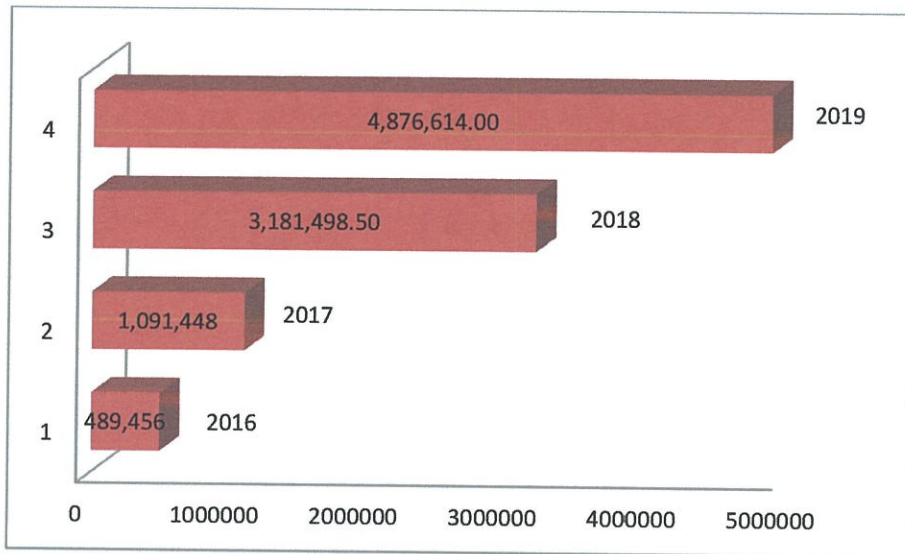
Capaian kinerja selama tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga pembangunan jangka menengah 2016-2021 untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi. Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan capaian tersebut dapat diukur dengan indikator yaitu :

~ Realisasi investasi : capaian realisasi investasi di Kota Batam pada tahun 2019 mencapai Rp. 4.876.614.000.000 dari jumlah perusahaan 461, capaian realisasi investasi mencapai 195.06% capaian ini meningkat dari realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.695.115.500.000 atau sebesar 53.28%.

Program yang mendukung untuk tercapainya indikator kinerja realisasi investasi adalah Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Kegiatan Promosi Penanaman Modal.

Gambar 3.1
Realisasi Investasi 2016-2019



Sumber data NSWI BKPM

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan capaian tersebut dapat diukur dengan indicator sebagai berikut :

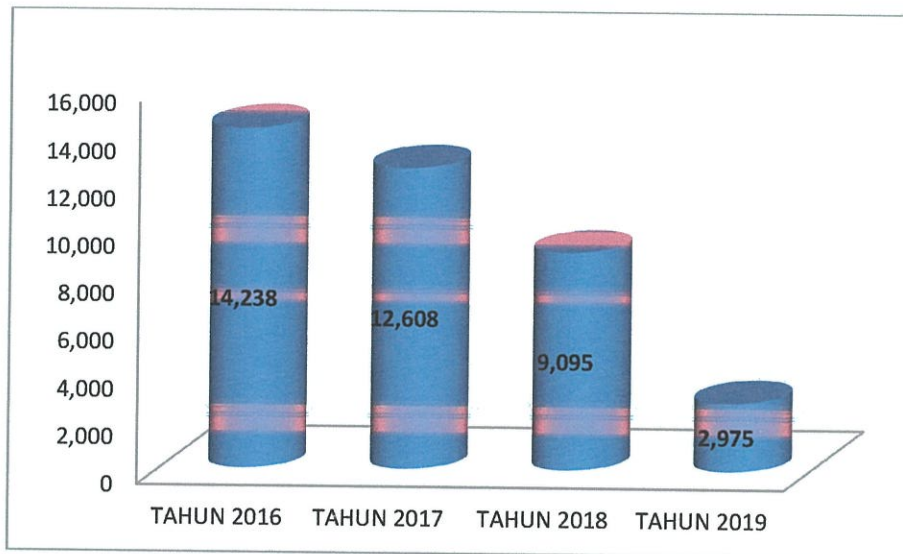
~ Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan : Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2019 sebanyak 2.847 Izin capaian kinerja pada indikator ini melampaui dari target 1.800 Izin yakni 1.047 Izin atau sebesar 165.27%.

Program yang mendukung untuk tercapainya indicator kinerja jumlah perizinan dan nonperizinan yaitu Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan dengan 2 (dua) kegiatan 1) Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial.

~ Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP : realisasi capaian indicator persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP sebesar 59.11% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Sehingga masih terdapat 40.89% izin yang belum dapat diselesaikan sesuai waktu SOP dan yang izin yang telah diterbitkan sesuai waktu SOP yang dapat direalisasikan dari target indikator kinerja sebesar

65.67%. Hambatan dan kendala dala, pencapaian target indikator kinerja tersebut dikarenakan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam baik dalam melakukan proses pemeriksaan berkas maupun penguasaan tugas dan fungsi di bidangnya.

Gambar 3.2
Jumlah Izin Terbit Tahun 2016-2019



Sumber data Bidang Promosi, Data & Perizinan DPMPTSP Kota Batam

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Penyebab utama kegagalan dalam capaian realisasi indikator kinerja antara lain :

- ~ Kurang memadainya kapasitas dan kualitas SDM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam memahami tugas dan fungsi;
- ~ Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan perizinan yang dapat menghambat kelancaran proses perizinan sampai terbitnya izin;
- ~ Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan secara reguler belum optimal;
- ~ Masih belum memedomani SOP yang telah ditetapkan secara maksimal.
- ~ Belum diterapkannya reward and punishment terhadap personil DPMPTSP Kota Batam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ~ Belum tersedia kebijakan terkait penerapan reward and punishment personil DPMPTSP Kota Batam.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, DPMPTSP Kota Batam telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ~ Mengusulkan penambahan SDM yang kompeten di bidang penanaman modal dan mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat dan Workshop yang terkait dengan penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang ada di bidang penanaman modal;
- ~ Menyusun Tim Teknis terkait penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- ~ Memantau pelaksanaan evaluasi perizinan dengan menyampaikan evaluasi secara regular;
- ~ Memedomi SOP seluruh jenis perizinan yang telah ditetapkan dengan pengawasan terhadap berkas perizinan yang akan diterbitkan apabila telah melebihi batas waktu SOP;
- ~ Penyederhanaan proses pengajuan dan penyelesaian perizinan sesuai ketentuan;
- ~ Menyusun Keputusan Kepala Dinas untuk penerapan reward and punishment dilingkungan DPMPTSP Kota Batam;
- ~ Mengefektifkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Batam tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019.

3.3 Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Analisis penggunaan sumber daya anggaran dipergunakan untuk :

- ~ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- ~ Sebagai wujud nyata komitmen;
- ~ Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ~ Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise;
- ~ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun 2019 alokasi anggaran pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebesar Rp. 8.160.622.277 atau 0.29% dari seluruh alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.790.719.083.602.16. Dari anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Batam yang dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	113.169.500	1.39
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	~ Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	5.923.197.590	72.58
		~ Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP		

Dari table di atas dapat diketahui indikator realisasi investasi hanya mendapat porsi anggaran 1.39% dari seluruh anggaran DPMPTSP Kota Batam dikarenakan besarnya anggaran sewa gedung Mal Pelayanan Publik Kota Batam sekaligus tempat DPMPTSP Kota Batam berkantor, besarnya beban anggaran pada sewa gedung telah menyerap 66.10% dari seluruh anggaran atau sebesar Rp. 5.394.420.000 per tahun. Kemudian anggaran pada indicator a) Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan; dan b) Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP sebesar 72.58% yang didalam termasuk alokasi anggaran sewa gedung tersebut.

Selanjutnya dalam table 3.6 dapat dijelaskan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran yang digunakan untuk membandingkan antara target kinerja dan capaian kinerja dengan realisasi anggaran di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2019 di bawah ini :

Tabel. 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	Rp. 2.5 T	Rp.4.876.614	195.06	113.169.500	113.169.500	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	1.800 Izin	2.975 Izin	165.28	5.923.197.590	5.800.588.593	97.93

		Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	59.11%	65.67		
--	--	--	-----	--------	-------	--	--

Dari persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, seperti tabel berikut ini :

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	195.06	100	1.95
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	165.28	97.93	1.69
		Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	69.67		

3.4 Realisasi Anggaran

Selanjutnya capaian realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.8
Program Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
1	Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	6.036.367.090	5.913.658.093	97.97
2	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.027.610.187	1.840.610.310	90.78
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96.645.000	93.313.819	96.55
Jumlah		8.160.622.277	7.847.582.222	96.16

Secara keseluruhan serapan anggaran pada program-program belanja langsung sudah baik dengan serapan melebihi dari 85%.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dilakukan berdasarkan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2019 serta kebijakan anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Batam Tahun 2016-2021.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah “Terwujudnya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing” dengan Sasaran 1) Meningkatnya realisasi investasi; dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sedangkan capaian kinerja Dinas Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Investasi, yang dilaksanakan oleh program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan dengan capaian kinerja sebesar Rp. 4.876.614.000.000 melebihi dari target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000.000;
2. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan, dilaksanakan oleh program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan dengan capaian kinerja sebanyak 2.975 Izin dari 1.800 Izin yang ditetapkan pada dokumen PENJA TA. 2019, hasil capaian kinerja yang dicapai melebihi target kinerja;
3. Persentase penyelesaian penerbitan izin sesuai waktu SOP, dilaksanakan oleh program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan dengan realisasi capaian kinerja 59.11%. Untuk target kinerja ini capaian realisasi belum sesuai dengan target dan masih harus mengejar 62.22% poin untuk mencapai target indikator kinerja di tahun 2020.

Dengan demikian untuk 5 (lima) tahun ke depan tujuan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 diharapkan tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan DPMPTSP Kota Batam.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019, diharapkan di tahun 2020 hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan, khususnya dalam mencapai target

kinerja dalam sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indicator kinerja Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP dapat tercapai sesuai ketertinggalan poin sebesar 62.22% pada pelaksanaan anggaran tahun 2020, langkah-langkah strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya untuk mengetahui letak hambatan dan kendala dalam mencapai target indikator kinerja tersebut.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2019 disusun dengan harapan dapat memberi kontribusi positif untuk perbaikan-perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Batam, Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002

LAMPIRAN:

1. FORMULIR PPS

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

1 SASARAN	2 INDIKATOR SASARAN	3 RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target Realisasi)	4 REALISASI	5 % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target)
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi	Rp. 2.5 T	Rp.4.876.614.000.000	195.06
Meningkatnya Kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	1800 Izin	2.975 Izin	165.28
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	59.11%	65.67

Batam, Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

FIRMAN SYAH

Pembina Utama Muda

NIP.19680412 198909 1 002

Lampiran:
2. Formulir PKK

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

Program (1)	Uraian (2)	Indikator Kinerja (3)	Kegiatan			Pencapaian Rencana tingkat Capaian (Target) (7)	Ket (8)
			Satuan (4)	Rencana Tingkat Capaian (Target Realisasi) (5)	Realisasi (6)		
Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	1 Kali promosi potensi investasi daerah Kota Batam mengikuti pameran skala nasional Cetak sertifikat perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup; cetak sertifikat perizinan bidang ekonomi dan sosial; 12 Bulan Sewa gedung MPP; belanja modal monitor display informasi perizinan	Realisasi Investasi Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	Rupiah	Rp 113,169,500	Rp 113,169,500	100.00	
			Izin	Rp 5,923,197,590	Rp 5,800,588,593	97.93	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	29 THL pendukung pelaksana tugas fungsi DPMP TSP; langganan internet, langganan listrik; ATK; belanja kebersihan; belanja materai; cetak dan penjiilidan dan perjalanan dinas untuk rapat dan koordinasi	100% per tahun 100% per tahun	%				
			Paket	Rp 2,027,610,187	Rp 1,840,610,310	90.78	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belanja modal Komputer PC 1 unit; pemeliharaan alat angkutan dan pemeliharaan alat kantor; belanja pengharum ruang	100 per tahun%	Paket	Rp 96,645,000	Rp 93,313,819	96.55%	

Batam, 4 Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FINWANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198509 1 002

Lampiran:
3. Formulir RKT

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Unit Kerja (1)	Sasaran (2)	Program (3)	Kegiatan (4)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Meningkatkan realisasi investasi	1 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	1 Promosi Penanaman Modal
	2 Meningkatkan Kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	1 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	2 Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas 3 Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial
		2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Batam, Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMAWISYAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002